Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia

Aulia Mahenda*
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
*e-mail: **auliamahenda7788@**gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi MK dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang, serta menilai efektivitas putusan MK dalam mempengaruhi proses pembentukan hukum nasional. Penelitian ini menjelaskan pentingnya peran MK sebagai penjaga konstitusi dan bagaimana fungsinya dalam pengujian undang-undang untuk menjaga keselarasan dengan UUD 1945, di tengah tantangan yang ada. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif, yang fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan MK terkait judicial review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki peran penting dalam pengujian undang-undang, lembaga ini menghadapi kendala seperti keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, dan tekanan politik. Meskipun demikian, putusan MK tetap berpengaruh signifikan terhadap pembentukan hukum nasional, dengan memberikan arahan bagi pembentuk undang-undang untuk mematuhi konstitusi. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa meskipun MK menghadapi beberapa tantangan, perannya dalam menjaga supremasi konstitusi dan mempengaruhi pembentukan hukum tetap esensial untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis di Indonesia.

Kata kunci : *Konstitusionalitas; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang.*

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the role of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi, MK) in maintaining the constitutionality of laws in Indonesia, identify the challenges faced by MK in carrying out its function of judicial review, and assess the effectiveness of MK's rulings in influencing the national law-making process. This study discusses the importance of MK's role as the guardian of the constitution and how its function in judicial review ensures alignment with the 1945 Constitution, amid the existing challenges. The research employs a qualitative approach with a normative legal method, focusing on the analysis of regulations and MK rulings related to judicial review. The results show that although MK plays an essential role in judicial review, the institution faces challenges such as limited accessibility, resources, and political pressures. Nonetheless, MK's rulings have a significant impact on the formation of national laws, providing guidance to lawmakers to adhere to the constitution. The conclusion of this study states that despite the challenges faced by MK, its role in safeguarding constitutional supremacy and influencing law-making remains essential for creating a fair and democratic legal system in Indonesia.

Keywords **:** *Constitutionality; Constitutional Court; Judicial Review.*

PENDAHULUAN

Negara hukum yang menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan adalah Indonesia. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar yang mengatur pembagian dan pelaksanaan kekuasaan negara, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Dalam konteks ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945 melalui reformasi konstitusi tahun 1999–2002, menjadi sangat penting. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution) dengan kewenangan utama melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Di antara kewenangan tersebut, fungsi pengujian undang-undang (*judicial review*) merupakan instrumen utama dalam menjaga agar produk legislasi tetap dalam koridor konstitusional (Abdul et al., 2018).

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua putusan MK ditindaklanjuti secara memadai oleh pembentuk undang-undang, sehingga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas MK dalam menegakkan supremasi konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih jauh mengenai "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia." Judul ini dipilih karena pentingnya memahami sejauh mana Mahkamah Konstitusi mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini juga berangkat dari adanya kesenjangan kajian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek normatif dan teoritis kewenangan MK, namun kurang mengulas secara mendalam implementasi dan dampak putusan MK dalam praktik ketatanegaraan, serta belum banyak yang mengkaji hambatan politik dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan putusan tersebut (Prawira, 2024).

Secara keilmuan, penelitian ini berada dalam ranah Hukum Tata Negara, karena membahas lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta relasi antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip checks and balances, mengawal agar legislasi tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusi, dan menjamin bahwa setiap norma hukum yang berlaku di Indonesia tunduk pada UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan Hukum Tata Negara di Indonesia (Maurisya & Satoto, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yakni: (1) bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia; (2) apa saja kendala yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang; dan (3) sejauh mana efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam memengaruhi proses pembentukan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan fungsi judicial review, serta menilai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam memengaruhi proses pembentukan hukum oleh DPR dan Presiden.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU MK, dan putusan MK), sekunder (literatur hukum tata negara), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori-teori hukum tata negara seperti supremasi konstitusi dan *checks and balances* (Pradika, 2020). Penelitian ini erat kaitannya dengan hukum tata negara karena membahas peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keterkaitan penelitian ini dengan hukum tata negara sangat erat karena menyangkut fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berperan menjaga keutuhan konstitusi melalui kewenangannya dalam melakukan *judicial review*. Melalui fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan agar setiap produk undang-undang tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia, terutama setelah amandemen UUD 1945 yang memberikan kewenangan yang luas kepada lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan. MK diberi tugas untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Presiden, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengharuskan seluruh produk hukum yang ada tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang menjadi dasar dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), peran MK sangat strategis dalam menjalankan tugas judicial review. Judicial review di sini dimaksudkan untuk menguji apakah undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden

bertentangan dengan konstitusi, baik secara materiil maupun prosedural. Sebagai contoh, jika terdapat undang-undang yang dianggap mengurangi atau mencederai hak-hak dasar warga negara atau prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945, MK dapat memutuskan untuk membatalkan atau merubah substansi dari undang-undang tersebut. Tugas ini penting karena produk hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat merusak dasar-dasar negara hukum yang dibangun di Indonesia (Siahaan, 2009).

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang ini juga diperkuat oleh prinsip supremasi konstitusi, yaitu bahwa UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, setiap peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 harus dibatalkan atau disesuaikan. Dalam melaksanakan tugas ini, MK bukan hanya bertindak sebagai penguji, tetapi juga sebagai pengawas dalam memastikan agar setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif dan eksekutif tidak mengancam atau bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Selain itu, dengan adanya Mahkamah Konstitusi, rakyat Indonesia memperoleh saluran untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional. Melalui permohonan uji materiil, individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang dapat mengajukan kasusnya ke MK kemudian menguji apakah undang-undang tersebut sejalan dengan prinsip dasar negara dan hak asasi manusia. Ini memberikan akses lebih luas kepada rakyat untuk keadilan dan perlindungan konstitusional (Syafriyani, 2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dengan menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip dasar negara(Adolph, 2016). Melalui putusan-putusan yang diambil, MK menjamin bahwa setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan dasar negara dan UUD 1945 .

2. Kendala yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsi Pengujian Undang-Undang

Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, lembaga ini tidak terlepas dari sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam menjalankan fungsi judicial review. Kendala-kendala ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain aksesibilitas, sumber daya, dan tekanan politik. Aksesibilitas menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan. Meskipun MK membuka jalur bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang, kenyataannya tidak semua individu atau kelompok yang terdampak oleh suatu undang-undang memiliki kapasitas atau akses untuk melakukan gugatan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah adanya "kepentingan hukum" yang langsung dan nyata terhadap undang-undang yang diuji. Hal ini seringkali menjadi penghalang bagi kelompok masyarakat atau individu yang tidak memiliki sumber daya mengajukan permohonan tersebut (Salam et al., 2025).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis juga menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengujian undang-undang. Proses judicial review membutuhkan analisis yang mendalam terkait aspek hukum, sosial, dan politik dari undang-undang yang diuji. Hal ini memerlukan hakim konstitusi yang memiliki pemahaman yang luas dan keahlian yang tinggi. Dengan beban tugas yang besar dan kompleksitas yang terus meningkat, MK memerlukan dukungan dari staf ahli dan tenaga pendukung yang memadai. Dalam beberapa kasus, kurangnya dukungan teknis dan sumber daya dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengujian. Selain itu, tekanan politik juga sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi MK. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah produk hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, MK kadang-kadang menghadapi situasi di mana keputusan-keputusan mereka mendapat tekanan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil putusan tersebut (Hasibuan & Rumesten, 2023).

Mahkamah Konstitusi menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan tugas pengujian undang-undang, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Terkadang, MK harus menghadapai tantangan dalam hal kapasitas teknis dan interpretasi terhadap pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam konstitusi. Selain itu, beban kerja yang tinggi juga mempengaruhi kualitas keputusan dan

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara yang masuk. Pihak-pihak tersebut, yang sering kali berasal dari kalangan politisi atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, dapat berusaha untuk memengaruhi keputusan MK atau memperburuk citra lembaga ini di mata publik. Meskipun MK berusaha untuk menjaga independensinya, tekanan politik tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses judicial review (Diea Amiliya, 2024).

3. Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Proses Pembentukan Hukum Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Sebagai lembaga yang menguji konstitusionalitas undang-undang, MK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam proses pembentukan hukum. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK sering kali menjadi dasar atau acuan bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki atau merumuskan undang-undang baru yang lebih sesuai dengan konstitusi. Salah satu bentuk pengaruh MK terhadap pembentukan hukum nasional adalah ketika MK membatalkan atau mengubah substansi dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya, jika MK memutuskan bahwa suatu pasal dalam undang-undang tidak sesuai dengan prinsip dasar negara atau hak asasi manusia, maka pasal tersebut bisa dicabut atau diubah. Dengan demikian, MK membantu memastikan bahwa semua produk hukum yang ada sejalan dengan konstitusi (Nainggolan et al., 2025).

Namun, efektivitas putusan MK juga bergantung pada sejauh mana keputusan tersebut diikuti dan diimplementasikan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam beberapa kasus, meskipun MK telah mengeluarkan putusan yang membatalkan atau merubah suatu undang-undang, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam undang-undang diuji. Ketidaksiapan legislatif untuk segera merubah atau merevisi undang-undang sesuai dengan putusan MK bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pembentukan hukum yang lebih baik. Di sisi lain, keberhasilan MK dalam memengaruhi proses pembentukan hukum nasional juga terlihat pada adanya pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis.

Melalui *judicial review*, MK berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional individu dan kelompok, serta memastikan bahwa hak-hak dasar yang terkandung dalam UUD 1945 dihormati. Sebagai contoh, jika ada undang-undang yang menyalahi hak-hak sipil, MK dapat memutuskan untuk mengubah atau membatalkan undang-undang tersebut demi melindungi prinsip demokrasi. Selain itu, MK juga mempengaruhi pembentukan hukum melalui berbagai putusan yang memberikan arahan kepada pembuat kebijakan untuk mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Putusan-putusan MK yang progresif sering kali menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan undang-undang baru yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat(Maslul, 2022).

Putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Selain memberikan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi, putusan MK juga dapat mendorong perubahan atau pengesahan undang-undang baru yang lebih sesuai dengan konstitusi. MK berperan sebagai check and balance dalam sistem hukum Indonesia, memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat . Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi, MK bertugas memastikan bahwa seluruh produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Namun, dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang, MK menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya akses masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan tekanan politik (Natasha & Priskap, 2021).

Meskipun demikian, putusan-putusan MK tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional, dengan memberikan arah dan batasan bagi pembentuk undang-undang untuk menjaga agar setiap peraturan yang dibuat tetap sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai tantangan, perannya tetap esensial dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis di Indonesia. Untuk memastikan efektivitasnya, MK membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga legislatif, serta upaya untuk meningkatkan

kapasitas dan independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi (Mungawanah et al., 2025).

SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia dengan melakukan judicial review terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dan Presiden, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan UUD 1945. Sebagai penjaga konstitusi, MK berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun demikian, MK menghadapi sejumlah kendala seperti aksesibilitas yang terbatas, keterbatasan sumber daya, dan tekanan politik yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Namun, keputusan MK tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembentukan hukum nasional, dengan mendorong revisi undang-undang yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, MK terus berperan dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis, dengan tetap membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk memastikan kapasitas dan independensinya terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, O., Husnan, G., Mahkamah, P., & Pendahuluan, K. (2018). *Mengenal Mahkamah Konstitusi Indonesia*. *2*(1), 71–76.

Adolph, R. (2016). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja Rasji1*. *2*(1), 1–23.

Diea Amiliya, S. T. M. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *4*(0), 1–23.

Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *22*(2), 42–55. https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713

Maslul, S. (2022). Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan. *Al-Hukama'*, *12*(1), 127–140. https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140

Maurisya, F., & Satoto, S. (2024). *Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu*. *1*(November), 319–360.

Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). *Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation*. *8*(2), 1257–1263. https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141

Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). *Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu : Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara*. *6*(1), 628–642.

Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *1*(3), 517–536. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911

Pradika, F. W. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, *6*(1), 73. https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793

Prawira, S. (2024). Menakar Karakteristik Produk Hukum Hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *Khairun Law Journal*, *7*(2), 94–109. https://doi.org/10.33387/klj.v7i2.7582

Salam, S. N., Kesejahteraan, P., Bandung, S., Barat, J., Kesejahteraan, P., Bandung, S., Barat, J., Info, A., Court, C., & Neutrality, J. (2025). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif*. *3*(1), 788–806. https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331

Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *16*(3), 357–378. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3

Syafriyani, N. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *2*(3), 90–99.